

Filantropi Islam, Faktor Makroekonomi, dan Kemiskinan: Panel Bukti Data dari Provinsi Mayoritas Muslim di Indonesia

Anisa Lestari¹, Trisca Relanda Putra¹, Siti Zubaidah¹

¹ Universitas Trunojoyo, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Kata kunci:

Zakat;
Data Panel;
Kemiskinan;
Filantropi Islam;
Indonesia

Riwayat artikel:

Diterima 29 Januari 2026
Direvisi 2026-03-13
Diterima 2026-05-07

ABSTRAK

Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, masih terdapat kesenjangan empiris mengenai dampak konsisten filantropi Islam dan indikator makroekonomi terhadap pengentasan kemiskinan, khususnya dalam model integratif yang mencakup fase pasca-pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu kemiskinan di provinsi-provinsi mayoritas Muslim di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 dengan mengintegrasikan filantropi Islam, makroekonomi, dan variabel sosio-demografis. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel, Model Efek Tetap (FEM) diidentifikasi sebagai model optimal berdasarkan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, secara efektif mengurangi angka kemiskinan. Sebaliknya, DSKL (Dana Sosial Keagamaan), rata-rata tahun sekolah, dan bantuan sosial menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Sementara itu, infaq, sedekah, pendapatan daerah (PAD), inflasi, upah minimum (UMP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IHK) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan model komprehensif yang membuktikan bahwa pengurangan kemiskinan membutuhkan sinergi antara instrumen keagamaan yang produktif dan kebijakan fiskal inklusif. Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah dan lembaga zakat harus mengoptimalkan tata kelola filantropi Islam terintegrasi bersamaan dengan penguatan sumber daya manusia untuk mencapai pengurangan kemiskinan berkelanjutan. Temuan ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan tata kelola filantropi Islam dengan kebijakan fiskal regional dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pengurangan kemiskinan berkelanjutan.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC-BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) lisensi.



Penulis Korespondensi:

Anisa Lestari

Universitas Trunojoyo, Indonesia; 220721100156@student.trunojoyo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Munculnya COVID-19 pada awal tahun 2020 membalikkan tren kemiskinan di Indonesia, meningkatkan tingkat kemiskinan dari 9,22% menjadi 10,19% dalam setahun. Kelompok ekonomi yang diakibatkan—disebabkan oleh pembatasan distribusi dan penghentian operasi bisnis—paling memukul kelompok rentan. Keluarga berpenghasilan rendah dan pekerja informal menghadapi dampak terberat dari krisis ini karena kehilangan pekerjaan meningkat dan kemampuan mereka untuk

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar menurun (BPS, 2025). Transisi dari tingkat pertumbuhan 5,02% pada tahun 2019 menjadi kontraksi -2,07% pada tahun 2020 menggarisbawahi parahnya dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia. Ketika aktivitas produksi nasional terhenti, pasar tenaga kerja semakin ketat dan tingkat pendapatan menurun, hal ini menggambarkan hubungan sistemik antara stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan finansial penduduk.

Singkatnya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata. (Anggi Rizkina Sari Siregar, Namira Hamni Lubis, Fadhilla Isfa, & Muzayyana Muzayyana, 2025). Salah satu indikator kunci keberhasilan proses pembangunan suatu negara adalah kemampuannya untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. (Hariyanto, Ekonomi dan Bisnis, & Airlangga, 2023). Kemiskinan di negara berkembang, termasuk Indonesia, merupakan masalah struktural yang mengakar. Hal ini tidak hanya bermanifestasi sebagai kekurangan finansial, tetapi juga sebagai kurangnya pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan secara sistemik. Untuk mengatasi kemiskinan sebagai isu multidimensional, kita harus mengadopsi kebijakan yang inklusif, terkoordinasi dengan baik, dan berkelanjutan (Wijayanti Diana, 2024).

Ketika ekonomi melambat atau menyusut, ekonomi berhenti menciptakan lapangan kerja yang cukup, sehingga mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan. Diperparah oleh terputusnya rantai pasokan global dan kenaikan harga yang memicu inflasi, yang menguras daya beli kaum miskin, yang sebagian besar anggaran mereka dihabiskan untuk kebutuhan pokok. Pendinginan ekonomi regional ini tercermin dalam angka PDB regional yang lebih rendah di seluruh negeri. Secara teori, ketika pertumbuhan regional tetap rendah dan inflasi tetap tidak stabil, kemiskinan meningkat karena pendapatan bersih masyarakat kehilangan nilainya (BPS, 2024). Kontraksi ekonomi secara tidak proporsional telah memengaruhi provinsi-provinsi mayoritas Muslim yang dicirikan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketergantungan pada tenaga kerja informal. Seiring dengan penurunan produktivitas regional, Pendapatan yang Dihasilkan Secara Lokal (PAD) juga menurun, sehingga mempersempit ruang fiskal yang tersedia untuk inisiatif kesejahteraan sosial dan pemberdayaan yang penting. Dengan kondisi ini, penting untuk melakukan analisis empiris tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal berinteraksi untuk memengaruhi hasil kemiskinan di provinsi-provinsi ini (Sari & Santoso, 2025).

Tingkat kemiskinan sangat terkait dengan profil sosio-demografis suatu wilayah, bukan hanya perubahan makroekonomi. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi sering menghadapi hambatan dalam pembangunan manusia, khususnya terkait pendidikan dan HDI. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi, kualitas pekerjaan yang tersedia, dan dampak upah minimum serta program bantuan sosial secara langsung memengaruhi apakah suatu keluarga dapat berhasil memutus siklus kemiskinan (Anggie, Desi, Triadelina, & Surta, 2024). Pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada makroekonomi yang stabil dan berkinerja tinggi. Pertumbuhan inklusif menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan membelanjakan uang, sementara PDB regional yang lebih tinggi mencerminkan lanskap produksi lokal yang berkembang dan memicu efek pengganda yang kuat bagi angkatan kerja (P Situmorang, 2024). Inflasi yang terkendali memainkan peran penting dalam melindungi mata pencaharian kelompok yang paling rentan dari kenaikan biaya hidup. Dengan memanfaatkan instrumen fiskal seperti pengeluaran sosial dan subsidi, bersama dengan kebijakan moneter yang menstabilkan harga, pemerintah dapat menjaga keseimbangan ekonomi. Pendekatan terkoordinasi yang melibatkan pertumbuhan stabil, inflasi rendah, dan pengawasan fiskal yang efisien sangat penting untuk mendorong pengurangan kemiskinan berkelanjutan selama periode pemulihan ekonomi (Angraeni, Uswatun, & Saiful, 2025).

Filantropi Islam, khususnya Zakat, Infaq, dan Sadaqah, serta DSKL menawarkan pendekatan berbasis komunitas untuk pengentasan kemiskinan yang melengkapi upaya pemerintah. Dengan potensi zakat tahunan Indonesia yang bernilai ratusan triliun rupiah, zakat menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk redistribusi kekayaan. Dengan memenuhi perannya dalam distribusi, alokasi produktif untuk usaha mikro, dan stabilisasi konsumsi, zakat memastikan bahwa kelompok yang paling rentan tetap aktif secara ekonomi dan tangguh (Priawan & Iqbal, 2024). Sementara itu, *infaq* dan *sedekah* memperluas cakupan bantuan sosial melalui kontribusi sukarela dan fleksibel. Dalam kerangka makroekonomi Islam, filantropi melampaui sekadar tindakan amal; ia berfungsi sebagai mekanisme struktural untuk mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan daya beli kaum miskin, dan mendorong transformasi ekonomi yang lebih adil (Amah Mas Fidiyatu, 2023).

Strategi makroekonomi memprioritaskan pertumbuhan, stabilitas harga, dan produktivitas regional (PDB) untuk memerangi kemiskinan secara efektif. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi masyarakat, sehingga mengurangi jumlah penduduk miskin secara keseluruhan (Sulhan, 2023). Keefektifan pendekatan ini sangat bergantung pada

Tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan yang tidak merata berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi, sehingga membatasi potensi manfaat bagi masyarakat miskin (Rahayu, 2024). Di sisi lain, perspektif filantropi Islam menempatkan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang secara langsung ditujukan kepada *mustahik* (penerima yang berhak). Mekanisme ini memainkan peran penting dalam mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi populasi rentan (Susanty, 2024). Namun demikian, pengumpulan dan distribusi dana ZIS yang sebenarnya, sebagaimana dilaporkan oleh BAZNAS, masih jauh di bawah potensi yang diperkirakan. Akibatnya, kontribusi makroekonomi ZIS terhadap pengurangan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang konsisten. Temuan empiris yang saling bertentangan mengenai dampak variabel makroekonomi dan ZIS terhadap kemiskinan ini mengungkapkan adanya kesenjangan penelitian yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut melalui model simultan dan komprehensif, khususnya yang memperhitungkan dinamika ekonomi sebelum, selama, dan setelah guncangan akibat pandemi (Molina, Yuliawaty, & Hidayah, 2023).

Meskipun semakin banyak literatur yang meneliti hubungan antara filantropi Islam, variabel makroekonomi, dan kemiskinan, temuan empiris tetap tidak konsisten. Beberapa studi mengkonfirmasi bahwa instrumen filantropi Islam seperti zakat, infaq, dan sadaqah secara signifikan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui redistribusi kekayaan dan mekanisme perlindungan sosial (Hariyanto dkk., 2023). Namun, studi lain melaporkan efek yang tidak signifikan atau tidak konsisten ketika instrumen-instrumen ini dianalisis bersama dengan indikator makroekonomi, menunjukkan bahwa efektivitas filantropi Islam sebagian besar bergantung pada tata kelola kelembagaan dan efisiensi mekanisme distribusi dana (Jubaidah, Hermawan, Rabbany, Triyana, & Dzikrayah, 2025). Inkonsistensi serupa juga ditemukan pada variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal regional, di mana beberapa studi menunjukkan dampak signifikan pada pengurangan kemiskinan, sementara studi lain mengungkapkan bahwa efek tetesan ke bawah tidak selalu mencapai kelompok rentan. Temuan yang saling bertentangan ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang jelas mengenai bagaimana filantropi Islam, kondisi makroekonomi, dan faktor sosio-demografis secara bersamaan memengaruhi dinamika kemiskinan. (Mustamin dkk., 2025) Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengatasi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model data panel integratif yang secara simultan menguji instrumen filantropi Islam, indikator makroekonomi, dan variabel sosio-demografis di provinsi-provinsi mayoritas Muslim di Indonesia selama periode 2019–2023. Dengan menggabungkan fase pra-pandemi, pandemi, dan pemulihan, penelitian ini memberikan penjelasan empiris yang lebih komprehensif tentang penentu kemiskinan di Indonesia.

Studi ini berkontribusi pada literatur dengan mengintegrasikan instrumen filantropi Islam (zakat, infaq, dan sadaqah) dengan variabel makroekonomi dan sosio-demografis dalam kerangka data panel yang mencakup periode pra-pandemi, pandemi, dan pemulihan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang menganalisis variabel-variabel ini secara terpisah, penelitian ini menyediakan model komprehensif yang menjelaskan interaksi antara keuangan sosial keagamaan dan indikator ekonomi regional dalam mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi mayoritas Muslim di Indonesia.

Studi ini menggunakan definisi operasional yang komprehensif: filantropi Islam diukur melalui volume Zakat, Infak, Sadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Variabel makroekonomi meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PDB, Pendapatan Daerah (PAD), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, sosio-demografis meliputi HDI, Rata-rata Tahun Sekolah (MYS), Tingkat Pengangguran, dan Bantuan Sosial. Studi ini berfokus pada 13 provinsi mayoritas Muslim di Indonesia, termasuk: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Lampung, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Sumatera Barat, Gorontalo (Herianingrum dkk., 2024). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh filantropi Islam integratif (zakat, infak, sedekah), variabel makroekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDB), faktor sosio-demografis (HDI, tahun sekolah, pengangguran), dan kapasitas fiskal daerah (pendapatan daerah, upah minimum, bantuan sosial) terhadap tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi mayoritas Muslim di Indonesia selama tahun 2019–Periode 2023. Dengan menggunakan pendekatan regresi data panel yang mencakup fase pra-pandemi hingga pemulihan, studi ini mengisi kesenjangan empiris melalui analisis simultan holistik. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi ekonomi Islam dan studi pembangunan, sekaligus merumuskan

Rekomendasi kebijakan terintegrasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan regional (Valiant Kevin, Bhinadi, & Syari'udin, 2022).

2. METODE

Mengumpulkan Sumber Data

Penelitian kuantitatif ini menerapkan model regresi data panel untuk menganalisis pengaruh filantropi Islam integratif (Zakat, Infaq, Shodaqoh, DSKL), indikator makroekonomi (Pertumbuhan Ekonomi, PDB, Anggaran Daerah, Upah Minimum), serta faktor sosiodemografis (HDI, Rata-rata Lama Sekolah, Pengangguran, Populasi) terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi mayoritas Muslim di Indonesia. Dengan mengambil unit analisis pada tingkat provinsi selama periode lima tahun dari 2019 hingga 2023, penelitian ini menggunakan data sekunder resmi dari Badan Pusat Statistik dan BAZNAS untuk menghasilkan total 156 observasi yang mencakup fase pra-pandemi, pandemi, dan pemulihan. Implementasi metodologi ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris spesifik mengenai penentu kemiskinan regional serta merumuskan rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Muhajirin, Risnita, & Asrulla, 2024).

Model regresi data panel dirumuskan sebagai berikut:

$$POV_{it} = \gamma + \gamma_1 ISLAMIC\ PHILANTHROPY_{1it} + \gamma_2 MACROECONOMICS_{2it} + \gamma_3 SOCIAL-DEMOGRAPHICS_{3it} + e$$

- Keterangan:
- Y = Tingkat kemiskinan
 - γ = Konstanta
 - X1 = Filantropi Islam (zakat, infaq, dan sedekah, DSKL)
 - X2 = Makroekonomi (inflasi, pendapatan asli daerah, pertumbuhan, upah minimum)
 - X3 = Demografi Sosial (HDI, rata-rata tahun sekolah, bantuan sosial, pengangguran)
 - (1,2,...) = koefisien regresi dari masing-masing variabel independen
 - e = istilah kesalahan
 - t = waktu
 - i = Provinsi

Tabel 1. Operasional

Variabel	Definisi	satuan	data sumber
Tingkat kemiskinan (Y)	Persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan	Persen (%) BPS	
Filantropi Islam (X1)	Akumulasi distribusi Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	Rupiah (Rp) BAZNAS	
Makroekonomi (X2)	Indikator makroekonomi meliputi Pertumbuhan Ekonomi, PDB, Pendapatan Daerah, dan Upah Minimum.	Persen & Rupiah	BPS
Sosial-demografi (X3)	Indikator HDI, RLS, bantuan sosial, dan Tingkat Pengangguran.	Skor/Tahun BPS	

Pemilihan Model Data Panel

Tes Makanan

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model Efek Umum dan model Efek Tetap. Jika nilai probabilitas (p-value) di bawah tingkat signifikansi 5%, Model Efek Tetap (FEM) dianggap lebih tepat. Selanjutnya, jika FEM dipilih, uji Hausman dilakukan untuk memutuskan antara model Efek Tetap dan model Efek Acak. Nilai p-value Hausman kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa

Model Efek Tetap adalah pilihan yang lebih unggul. Selain itu, uji Pengali Lagrange (LM) dapat digunakan untuk membandingkan model Efek Umum dan Efek Acak jika diperlukan. Setelah model optimal diidentifikasi, pengujian signifikansi parameter dilakukan.

H_0 : Model yang digunakan adalah model efek umum

H_1 : Model yang digunakan adalah model efek tetap

$$\hat{\gamma} = \frac{[\hat{\gamma} \hat{\gamma}']}{\hat{\gamma} (\hat{\gamma} \hat{\gamma}')}$$

$$RRS = \hat{\gamma}^2$$

$$URRS = \hat{\gamma}^2$$

$\hat{\gamma}^2$ = jumlah kuadrat kesalahan estimasi data panel efek umum

$\hat{\gamma}^2$ = jumlah kuadrat kesalahan estimasi efek tetap data panel

Kriteria untuk pengujian kondisi adalah jika hasil Uji Chow > F (n-1), (nt-nk) atau *nilai p* > $\hat{\gamma}$ maka kesimpulannya adalah menolak H_0 . Ini menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah model efek tetap. Jika ini benar, maka uji Hausman digunakan.

Tes Hausman

Uji Hausman adalah alat yang berguna untuk membandingkan dua model regresi data panel, yaitu model efek tetap dan model efek acak. Berikut adalah hipotesis dari Uji Hausman.

H_0 : Model yang digunakan adalah model efek acak

H_1 : Model yang digunakan adalah model efek tetap

Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Hausman:

$$H^2(K) = (b - \hat{\gamma})' [var(b - \hat{\gamma})]^{-1} (b - \hat{\gamma})$$

Keterangan:

b = koefisien efek acak

$\hat{\gamma}$ = koefisien efek tetap

Statistik Husman terdistribusi menurut chi-kuadrat, jika nilai H^2 dari tes hausman 2

> $\chi^2_{(k)}$ (k = jumlah variabel prediktor) atau nilai $p < \hat{\gamma}$, maka kesimpulannya adalah menolak H_0 . Ini berarti (,) bahwa model efek tetap dipilih.

Uji Pengali Lagrange (LM)

Uji Pengali Lagrange (LM) digunakan untuk menentukan apakah model regresi data panel yang tepat adalah Model Efek Umum (CEM) atau Model Efek Acak (REM). Model statistik uji LM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LM = \frac{[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k \hat{\epsilon}_{ij} \hat{\epsilon}_{ij}]^2}{2(\hat{\gamma} \hat{\gamma}') (\hat{\gamma} (\hat{\gamma} \hat{\gamma}')^{-1} \hat{\gamma})}$$

Hasil uji LM menunjukkan nilai $p < 0,05$, oleh karena itu H_0 ditolak. Ini berarti ada faktor acak. efek tersebut dan model yang lebih tepat untuk digunakan adalah Model Efek Acak (Random Effect Model/REM).

Uji Kesalahan Standar yang Kuat

Kesalahan standar robust diterapkan untuk mengatasi potensi pelanggaran asumsi klasik dalam regresi data panel, khususnya heteroskedastisitas dan autokorelasi. Masalah-masalah ini sering terjadi pada data panel yang menggabungkan observasi lintas sektoral dan deret waktu. Penggunaan kesalahan standar robust memberikan estimasi varians yang lebih konsisten, sehingga menghasilkan statistik t dan nilai p yang lebih andal dalam mengevaluasi signifikansi variabel penjelas.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Dalam mengestimasi model analisis regresi data panel, terdapat beberapa estimator yang digunakan, yaitu model Common Effect, model Fixed Effect, dan model Random Effect. Penentuan model terbaik dalam penelitian ini adalah model Fixed Effect karena alasan berikut.

alasan:

Tabel 2. Analisis regresi data panel	
Model	Kemungkinan
CEM	0,0000
FEM	0,0010
REM	96751541

Sumber: StataMP17 (Hasil data yang diproses)

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai probabilitas pada Model Efek Umum (Common Effect Model/CEM) adalah $0,0000 < \text{Prob } 0,005$ dan pada Model Efek Tetap (Fixed Effect Model/FEM) adalah $0,0010 < \text{Prob } 0,0000$, kedua nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa model-model tersebut signifikan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Sementara itu, nilai probabilitas pada Model Efek Acak (Random Effect Model/REM) adalah $96751541 > \text{Prob } 0,005$, menunjukkan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan model-model lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Model Efek Acak kurang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tes Pemilihan Model

Hasil pemilihan model regresi data panel disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Pemilihan Model		
Model	Hasil Perbandingan	Keputusan
Tes Makanan	Probabilitas CEM vs FEM < 0,05	FEM lebih baik
	Probabilitas FEM vs REM < 0,05	FEM lebih baik
Tes Hausman	Probabilitas CEM vs REM < 0,05	REM lebih baik daripada CEM
	Pengali Lagrange 0,05	

Sumber: StataMP17 (hasil data yang diproses)

Berdasarkan hasil pengujian, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effects Model (FEM). Model ini dipilih karena dapat menangkap perbedaan karakteristik di berbagai provinsi mayoritas Muslim di Indonesia yang tetap konstan selama periode penelitian 2019–2023. Dengan menggunakan FEM, estimasi dampak filantropi Islam, variabel makroekonomi, dan sosiodemografis terhadap kemiskinan dapat dianalisis dengan lebih akurat.

Uji Asumsi

Hasil dari pengujian asumsi manajemen pada Uji Heteroskedastisitas, Serial Uji Autokorelasi, Uji Ketergantungan Lintas Bagian pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Asumsi			
Model	Perbandingan Hasil Prob < 0,05		Keputusan
Uji Heteroskedastisitas		0,0000	Heteroskedastisitas Terjadi
Autokorelasi Serial	0,0147		
Tes		Probabilitas < 0,05	Terjadi Autokorelasi Serial
Penampang			Ketergantungan Penampang Lintang
Tes Ketergantungan	0,0000	Probabilitas < 0,05	Muncul

Sumber: StataMP17 (hasil data yang diproses)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (Prob < 0,05), menunjukkan bahwa model penelitian mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi serial menunjukkan nilai probabilitas 0,0147, yang juga lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model mengalami autokorelasi. Sementara itu, uji ketergantungan lintas bagian menunjukkan nilai probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi, menunjukkan adanya ketergantungan antar unit lintas bagian. Dengan demikian, model penelitian diindikasikan mengalami heteroskedastisitas, autokorelasi, dan ketergantungan lintas bagian. Dalam estimasi Model Efek Tetap (FEM), kondisi ini tidak menyebabkan koefisien regresi menjadi bias, tetapi dapat mengakibatkan kesalahan standar yang tidak efisien, sehingga pengujian signifikansi parameter menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Kesalahan Standar Driscoll–Kraay untuk menghasilkan estimasi kesalahan standar yang lebih kuat terhadap ketiga masalah tersebut.

Sementara itu, uji endogenitas tidak diperlukan dalam FEM.

Tes Serentak

H0: model tidak sesuai atau tidak ada variabel yang berpengaruh

H1: model sesuai atau setidaknya 1 variabel independen. H0 ditolak dan disimpulkan bahwa H1 diterima dengan model yang sesuai atau setidaknya 1 variabel independen yang berpengaruh.

Tabel 5. Hasil pengujian simultan

Model	Kemungkinan
FEM	0,0010

Sumber: StataMP17 (hasil data yang diproses)

Nilai probabilitas = 0,0010 < (0,05) maka H0 dan disimpulkan bahwa H1 diterima dengan model yang sesuai atau setidaknya 1 variabel independen yang memiliki pengaruh.

Tes Parsial / Tes T

Hasil pengelolaan Uji Parsial pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Tes Parsial

Variabel	P> t
zakat	0,038
infagdansodaqoh	0,150
Dskl	0,002
Pertumbuhan ekonomi	0,045
PAD Realisasi	0,308
Inflasi	0,659
UMP	0,076
IPM	0,413
Rata-rata lama sekolah	0,019
Pengangguran	0,571
bansos	0,003

Sumber: StataMP17 (hasil data yang diproses)

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji parsial pada pengaruh tetap untuk variabel zakat, DSKL, pertumbuhan ekonomi, rata-rata tahun sekolah, dan bantuan sosial memperoleh nilai t-hitung dan p-value $< \bar{y}$ (5%), artinya kelima variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, infaq dan sedekah, realisasi PAD, inflasi, upah minimum, HDI, dan pengangguran menunjukkan nilai t-hitung dan p-value $> \bar{y}$ (5%), artinya keenam variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan.

Persamaan Regresi

Kemiskinan = - 2,01 zakat + 3,25 infaq dan sedekah + 1,11 - 2529.789 pertumbuhan ekonomi - 0,0185233 Realisasi Pad – 465.7974 Inflasi - 0.0004272 UMP – 37.54152 HDI + 873.9049 Rata-rata Durasi Sekolah – 21.66434 Pengangguran + 4.84 Bantuan Sosial.

1. Pengaruh Filantropi Islam terhadap Kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel zakat memiliki nilai probabilitas 0,038 ($< 0,05$), yang mengindikasikan bahwa zakat memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Hasil ini menyiratkan bahwa peningkatan distribusi zakat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi mayoritas Muslim. Dari perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mentransfer sumber daya dari individu kaya kepada mustahik (penerima yang memenuhi syarat). Melalui proses redistribusi ini, zakat meningkatkan daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah dan memperkuat ketahanan ekonomi mereka. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan yang menunjukkan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. (Duriatin koni`ah dan Khoiri, 2025).

Sebaliknya, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel infaq dan sadaqah memiliki nilai probabilitas 0,193 ($> 0,05$), yang berarti pengaruhnya terhadap kemiskinan secara statistik tidak signifikan. Meskipun instrumen filantropi ini secara teoritis berkontribusi pada kesejahteraan sosial, dampaknya pada tingkat makro tetap terbatas. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa sebagian besar infaq dan sadaqah didistribusikan secara informal atau langsung oleh individu daripada melalui lembaga formal seperti BAZNAS. Sebagai Akibatnya, distribusi cenderung terfragmentasi dan kurang efektif dalam mengatasi kemiskinan struktural (Murobbi, 2021).

Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) memiliki koefisien 1,111 dengan nilai probabilitas 0,010 ($< 0,05$), yang mengindikasikan hubungan yang signifikan secara statistik dengan tingkat kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana sosial keagamaan memainkan peran penting dalam dinamika kemiskinan. Namun, koefisien positif menunjukkan bahwa dana tersebut mungkin masih sebagian besar didistribusikan secara konsumtif daripada melalui program pemberdayaan produktif. Efektivitas dana sosial keagamaan dalam mengurangi kemiskinan bergantung pada pendekatan pengelolaannya, khususnya apakah dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif yang meningkatkan kesejahteraan jangka panjang penerima manfaat. (Ainol Yaqin, 2022).

2. Dampak Makroekonomi terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi inflasi menunjukkan koefisien -465,79 dengan nilai probabilitas 0,434 ($> 0,05$), yang mengindikasikan bahwa inflasi tidak memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat harga selama periode pengamatan tidak secara langsung berdampak pada perubahan tingkat kemiskinan. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah adanya intervensi pemerintah melalui subsidi dan program bantuan sosial yang membantu menstabilkan daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah. Akibatnya, tekanan inflasi mungkin tidak secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan ketika kebijakan perlindungan sosial yang memadai telah diterapkan (R. Susanto & I. Pangesti, 2020).

Demikian pula, Pendapatan Daerah Asli (PAD) menunjukkan hubungan negatif tetapi secara statistik tidak signifikan dengan kemiskinan, dengan nilai probabilitas 0,308 ($> 0,05$). Meskipun peningkatan pendapatan daerah secara teoritis meningkatkan kapasitas fiskal untuk program pengurangan kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD yang lebih tinggi tidak secara otomatis menyebabkan penurunan kemiskinan. Kondisi ini mungkin terjadi karena pendapatan daerah tidak selalu dialokasikan secara efektif untuk program yang menargetkan populasi rentan (Saputra, Supeno, & Wardi, 2023).

Variabel upah minimum (UMP) juga menunjukkan hubungan negatif namun secara statistik tidak signifikan dengan kemiskinan, dengan nilai probabilitas 0,076 ($> 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum memiliki pengaruh terbatas terhadap pengurangan kemiskinan. Salah satu penjelasannya adalah bahwa peraturan upah minimum terutama memengaruhi pekerja di sektor formal, sedangkan sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal dan oleh karena itu tidak terpengaruh oleh penyesuaian upah minimum (Alisha, Putri, 2021).

3. Pengaruh Sosial-Demografis terhadap Kemiskinan

Variabel Rata-Rata Tahun Sekolah (MYS) menunjukkan koefisien sebesar 873,9049 dengan nilai probabilitas 0,019 ($< 0,05$), yang mengindikasikan hubungan yang signifikan secara statistik dengan tingkat kemiskinan. Menariknya, koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata tahun sekolah dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di provinsi-provinsi yang diamati. Hasil ini mungkin mencerminkan masalah struktural di pasar tenaga kerja, di mana pencapaian pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu menjamin peluang kerja atau pendapatan yang lebih tinggi. Di beberapa wilayah, ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan permintaan pasar tenaga kerja dapat mencegah pendidikan untuk diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi (Surbakti, Muchtar, & Sihombing, 2023).

Variabel pengangguran menunjukkan nilai probabilitas 0,571 ($> 0,05$), yang mengindikasikan bahwa pengangguran tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam model yang diestimasi. Hasil ini mungkin terjadi karena banyak individu yang diklasifikasikan sebagai pengangguran masih terlibat dalam kegiatan ekonomi informal, yang memberikan sumber pendapatan minimal namun penting. Oleh karena itu, tingkat pengangguran tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kerentanan ekonomi yang dialami oleh rumah tangga (Febrianti & Utami, 2024).

Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa bantuan sosial (Bansos) memiliki koefisien 4,84 dengan nilai probabilitas 0,003 ($< 0,05$), yang menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan kemiskinan. Namun, koefisien positif tidak serta merta berarti bahwa bantuan sosial meningkatkan kemiskinan. Sebaliknya, hubungan ini mencerminkan sifat penargetan program bantuan sosial, yang secara khusus diarahkan kepada penduduk miskin dan rentan. Akibatnya, daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi cenderung menerima alokasi bantuan sosial yang lebih besar. (Rivaldo, Rosyetti, & Sidabalok, 2025).

Terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hubungan negatif tetapi secara statistik tidak signifikan dengan kemiskinan, dengan nilai probabilitas 0,413 ($> 0,05$). Meskipun peningkatan pembangunan manusia secara teoritis berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, efeknya mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek. Peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup membutuhkan waktu sebelum diterjemahkan ke dalam hasil ekonomi yang terukur seperti peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Secara keseluruhan, temuan ini menyoroti bahwa instrumen filantropi Islam—khususnya zakat—bersama dengan kebijakan sosial-ekonomi tertentu—memainkan peran penting dalam memengaruhi dinamika kemiskinan. Namun, efektivitas instrumen-instrumen ini sebagian besar bergantung pada tata kelola kelembagaan, mekanisme distribusi, dan integrasi program kesejahteraan sosial dengan strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas (Yusuf, Wibowo, Hidayati, & Khusniati, Novi'ah., 2020).

4. KESIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh filantropi Islam, variabel makroekonomi, dan faktor sosio-demografis terhadap tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi mayoritas Muslim di Indonesia selama periode 2019–2023. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa beberapa variabel secara signifikan memengaruhi dinamika kemiskinan. Di antara instrumen filantropi Islam, zakat menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa mekanisme redistribusi yang tertanam dalam zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga berpenghasilan rendah. Sebaliknya, infaq dan sadaqah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa dampaknya pada tingkat makro masih terbatas karena mekanisme distribusi yang terfragmentasi dan sebagian besar informal. Sementara itu, dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemiskinan, menyoroti pentingnya memperkuat tata kelola dan alokasi dana sosial keagamaan untuk meningkatkan

Efektivitas dalam pengentasan kemiskinan. Dari perspektif faktor makroekonomi dan sosio-demografis, pertumbuhan ekonomi, rata-rata tahun pendidikan, dan program bantuan sosial menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemiskinan, sementara inflasi, pendapatan daerah (PAD), upah minimum, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan dipengaruhi tidak hanya oleh kondisi makroekonomi tetapi juga oleh efektivitas mekanisme redistribusi sosial dan kebijakan pengembangan modal manusia.

Oleh karena itu, penguatan manajemen kelembagaan instrumen filantropi Islam, peningkatan efisiensi penargetan program bantuan sosial, dan penyelarasan hasil pendidikan dengan tuntutan pasar tenaga kerja merupakan strategi penting untuk meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

REFERENSI

- Ainol Yaqin, malik A. (2022). Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 515. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4415>
- Alisha, Putri, Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Sumatera Barat. *Pendidikan Ekonomi*, 4(4), 581–593. Diperoleh dari <http://www.jkmk.akademimanajemen.or.id>
- Almausshofi, Novika, I., Nurmala, SD, Aida, N., Hudani, MM, & Nindien, QA (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2024. *Jurnal Masyarakat Sosial*, 5(1), 272–282. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.684>
- Amah Mas Fidiyatuh, dan PKE (2023). *Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan*. 2(4), 929–939.
- Anggi Rizkina Sari Siregar, Namira Hamni Lubis, Fadhilla Isfa, & Muzayyana Muzayyana. (2025). Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 51–64. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v5i1.3424>
- Anggie, P., Desi, W., Triadelina, HE, & Surta, ST (2024). Tinjauan Multidisiplin Terhadap Kemiskinan di Indonesia : Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin: Madani*, 2(12), 550–553.
- Angraeni, M., Uswatun, U., & Saiful, M. (2025). Analisis Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ekonomi*, 82–90. <https://doi.org/10.30605/jurnalpenelitianekonomi.v1i3.143>
- BPS. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2024. Diakses pada 26 Februari 2026, dari situs web badan pusat statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WkdVMWRYVnBkMnBvVEhKSVkyWXhNblZiTjJSbmR6MDkzMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--miliar-rupiah---2022.html?tahun=2024>
- BPS. (2025). Daerah, Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan. Diakses tanggal 26 Februari 2026, dari website badan pusat statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1ZlI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Duriatin, dan Khoiri, K. (2025). Pengaruh Zakat dan Infaq Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(edisi Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10, Juni terbitkan), dari <https://journal.unpas.ac.id/index.php/peddas/article/view/26695>
- Febrianti, E., & Utami, HW (2024). PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENDUDUK MISKIN DI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2020-2024. *Edueco Universitas Balikpapan*.
- Hariyanto, NB, Ekonomi dan Bisnis, F., & Airlangga, U. (2023). Analisis Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), IPM, Inflasi, dan PDRB Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, mulai 9(01), Tahun 1189–1196. Diperoleh

- <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7934>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7934>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat sebagai instrumen pengurangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Riset Bisnis Islam*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Jubaidah, HN, Hermawan, MZ, Rabbany, RK, Triyana, T., & Dzikrayah, F. (2025). Peran Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. *Tinjauan Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.9991>
- Molina, R., Yuliawaty, L., & Hidayah, VN (2025). Optimalisasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Program Baznas Ciamis. *RIGGS: Jurnal Kecerdasan Buatan dan Bisnis Digital*, 4(2), 7396–7403. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1868>
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Murobbi, MN (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 846–857. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- Mustamin, SW, Abdillah S., AS, Mansyur, F., Ridwan, M., Amri, & Fitriyani U, F. (2025). Peran zakat dalam makroekonomi Islam: Instrumen fiskal untuk stabilitas selama krisis ekonomi global. 253–274. *Jurnal dari Islam Ekonomi Lariba*, 11(1), <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art10>
- P Situmorang, RS (2024). Analisis Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Prima Lestari Situmorang Universitas Musamus Riris Lawitta Maulina Siahaan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas perekonomian suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan penduduk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak (JIEAP)*, 1(2), 245–255.
- Priawan, F., & Iqbal, I. (2024). *Pengetas Kemiskinan Dalam Perspektif Islam*.
- R. Susanto & I. Pangesti. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan (JABE)*, 7(2), 329–334.
- Rahayu, K. (2024). *Penentu Inklusivitas Pertumbuhan Ekono di Provinsi Jambi*. (1), 161–166.
- Rivaldo, M., Rosyetti, & Sidabalok, S. (2025). Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Bantuan Sosial Pangan Terhadap Kemiskinan Di Pekanbaru Dan Dumai. *Jurnal Tabarru': Perbankan dan Keuangan Islam*, 8(1), 279–287. [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).23549](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).23549)
- Saputra, I., Supeno, B., & Wardi, J. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Modal Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau. *Jurnal Komunitas Sains Manajemen*, 2(2), 234–250. Diperoleh dari <http://www.jkmm.akademimanajemen.or.id>
- Sari, PH, & Santoso, RP (2025). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012-
Tahun 2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Keuangan Dan*, 3(2), <https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss2.art12>
- Sulhan, M. (2023). *Teori Makro Ekonomi*. Penerbit Buku Indonesia. Diperoleh dari https://www.researchgate.net/publication/394142405_TEORI_EKONOMI_MAKRO
- Surbakti, SPP, Muchtar, M., & Sihombing, PR (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021. *Ecoplan*, 6(1), 37–45. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.631>
- Susanty, MI (2024). *Peran dan Pengelolaan Negara Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Indonesia*. 2(10), 1636–1642.
- Valiant Kevin, A., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). Pengaruh Pdrb, Angka Harapan Hidup, Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021. *JURNAL SIBATIK: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2959–2968. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>
- Wijayanti Diana, R. . (2024). Dampak Kemiskinan, PDRB, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau Tahun 2018-2023. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(2), 595–603.
- Yusuf, MZ, Wibowo, MG, Hidayati, N., & Khususniati, Novi'ah., D. (2020). Pengaruh Pendidikan dan

IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Ypgyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, Daerah Istimewa Yogyakarta.*